

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

AA. Oka Mhendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Abdullah Sulaeman, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Abdurahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983.

Abdurahman, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Kencana: Jakarta), 2015.

Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Alvin Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

AP. Parlindungan, *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, 1993.

AP. Parlindungan III, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.

BF. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2005.

- Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017.
- Efendi Perangin angin, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007.
- H.K. Matono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2016.
- H. K. Martono & Agus Pramono, *Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Haji Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- H.M.Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet. 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- LJ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Maria SW, Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Press, Jakarta, 2007.
- Maria SW, Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Maria SW, Sumardjono, *Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil Atas Sumberdaya Alam*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.

Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Muhadar, Ratnaningsih, *Victimasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan Tanah, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Peter Butt, *The Law Company Limited*, Land Law Edition, Canberra, 1999.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan Khairandy, *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Soedaryo Soemin, *Status Hak Dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Bandung, 1996.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007.

Umar Said Sugiharto, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Press, Malang, 2015.

Y. Wartaya Winangun, *Tanah Sumber Nilai Hidup*, Kanisius, Yoogyakarta, 2004.

## Jurnal dan Karya Ilmiah

Agung Basuki Prasetyo, *Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Ashar Sinile, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Hardianto Djanggih, Salle Salle, *Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.

Baiq Setiani, *Prinsip – Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar Udara*, Jurnal Ilmiah Widya.

Ni Wayan Lusiana Sari, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Pembangunan Kawasan Bandar Udara*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2020.

Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin law review*, 1(1), 27-46.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

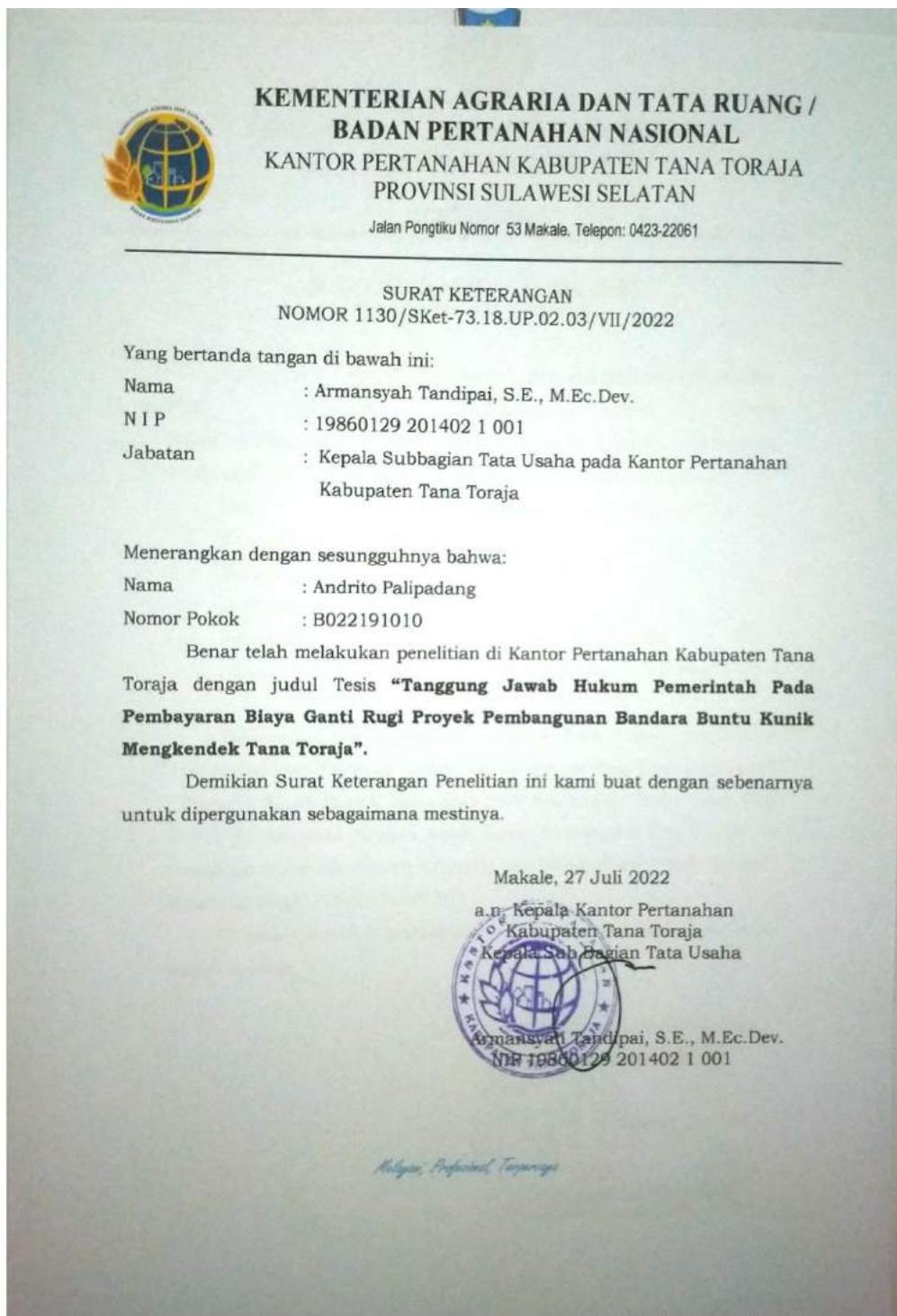
## **Internet**

Kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Tanah+Pembangunan+Bandara+Baru+Tana+Toraja+Masih+Bermasalah&dn=20200815095036 diakses pada tanggal 03 Agustus 2020

Ramadhan Muawad, Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, Wordpress,  
<https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2015/10/28/hak-atas->

[tanah-dan-peralihan-hak-atastanah-dalam-hukum-tanah-nasional-2/](#), diakses pada tanggal 23 agustus 2020, pukul 15.12 WITA.

## LAMPIRAN



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
KECAMATAN MENGKENDEK**

Jln. Buntu Gashug No.276  
GE'TENGAN

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 255 / KM / VIII / 2022

Merujuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Toraja  
Nomor : 108/IP/DPMPTSP/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022 tentang Izin Penelitian,  
dengan ini Camat Mengkendek Kabupaten Tana Toraja menerangkan bahwa :

Nama	:	Andrito Palipadang
Nomor Pokok	:	B022191010
Tempat/Tgl. Lahir	:	Palu, 13 November 1996
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa Pasca Sarjana Kenotariatan
Alamat	:	Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Benar-benar telah mengadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data/referensi yang diperlukan guna penyusunan dan penulisan Tesis dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Pada Pembayaran Biaya Ganti Rugi Proyek Pembangunan Bandara Buntu Kunik Mengkendek Tana Toraja" di wilayah Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja selama 1 (Satu) minggu , mulai sejak tanggal 25 Juli – 31 Juli 2022.

Demikianlah surat keterangan penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Tana Toraja, 02 Agustus 2022



Dipindai dengan CamScanner

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Telp. (0423) 22562 Makale

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800.780/BPKAD-01/786/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja menerangkan bahwa :

Nama	:	ANDRITO PALIPADANG
Nomor Induk Mahasiswa	:	2022191010
Universitas	:	Universitas Hasanuddin
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan judul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH PADA PEMBAYARAN BIAYA GANTI RUGI PROYEK PEMBANGUNAN BANDARA BUNTU KUNIK MENGKENDEK TANA TORAJA**" mulai dari tanggal 04 Juli 2022 s/d 04 Agustus 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 05 Agustus 2022



Dipindai dengan CamScanner



